

## **STABILITAS UMKM PADA PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT PALEMBANG PASCA PANDEMI COVID 19**

**Kiki Mikail<sup>1</sup>, Maya Panorama<sup>2</sup>, Otoman<sup>3</sup>**

*[kikimikail@radenfatah.ac.id](mailto:kikimikail@radenfatah.ac.id)<sup>1</sup>, [mayapanorama\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:mayapanorama_uin@radenfatah.ac.id)<sup>2</sup>,  
[otoman\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:otoman_uin@radenfatah.ac.id)<sup>3</sup>*

**Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang<sup>1</sup>, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam UIN Raden Fatah Palembang<sup>2</sup>, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah  
Palembang<sup>3</sup>**

### ***ABSTRACT***

*The study applied the theory of economic development to solve the problems and challenges of the economic recovery the small and medium enterprise (SME) after covid 19. The policy of social distancing has certainly change the economic activities of the people of Palembang. As a result of this policy, the economic growth Palembang People slows down and decreases by around 3 percent in 2020. Therefore, dynamic policies and development are needed to respond economic proble post covid 19. The peak economic slowdown in Palembang generally is influenced by a number of factors, ranging from decline in household consumption, investment to exports. Form three components, household consumption have paleyd major role in suppressing the Palembang economy due to the covid 19 pandemic. Therefore, for economic revival post covid 19, the Palembang local government must strengthen public institutions and services and align a strategies provide clear signal for better and systematic transition. Reforming renewable energy and increasing local production and the small and medium enterprise (SME) will gradually increase the economic resilience of the private sector. Increasing adequacy in the early of the post covid 19 economic recovery is significantly to control ivesment and economic growth in Palembang*

**Key words:** Small and Medium Enterprise (SME), Economic Growth, Covid 19

### ***ABSTRAK***

Penelitian ini menggunakan teori ekonomi pembangunan politik untuk menjawab persoalan dan tantangan *recovery* perekonomian UMKM pasca covid 19. Kebijakan Pemerintahan Jokowi mengenai penerapan *social distancing* pada gilirannya menjadikan aktivitas perekonomian masyarakat Palembang semakin berjalan tidak sesuai yang ditargetkan. Akibat kebijakan tersebut juga, membuat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat Palembang lambat dan turun sekitar 3 persen pada tahun 2020. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan dan pembangunan yang dinamis dan dapat segera merespon segala persoalan ekonomi pasca covid 19. Beberapa alasan krusial yang membuat perlambatan ekonomi Sumsel yaitu dimulai dari penurunan konsumsi rumah tangga, investasi hingga ekspor. Dari ketiga komponen tersebut, konsumsi rumah tangga atau Sembilan bahan pokok yang berperan besar dalam menekan laju perekonomian Palembang akibat pandemic covid 19. Untuk kebangkitan ekonomi pasca covid 19, Pemerintah Kota Palembang harus memperkuat institusi publik dan pelayanan serta menyelaraskan strategi yang memberikan sinyal yang jelas terhadap arah transisi yang lebih baik dan sistematis. Mereformasi energi terbarukan dan meningkatkan produksi lokal dan UMKM secara bertahap akan meningkatkan ketahanan ekonomi sector swasta. Meningkatkan kecukupan pendapatan pada masa awal pemulihan ekonomi pasca covid 19 menjadi penting untuk membiayai kebutuhan investasi jangka Panjang.

**Kata kunci:** UMKM, Pertumbuhan Ekonomi, Covid 19

## PENDAHULUAN

Sehubungan telah terjadinya pandemi covid 19 hampir diseluruh pelosok dunia yang pada gilirannya memberikan dampak besar tidak hanya pada angkat kesehatan dan kematian, tetapi juga telah memberikan pukulan besar terhadap perekonomian di seluruh dunia khususnya pada masyarakat Kota Palembang. Selain hal tersebut, adanya regulasi pemerintah yang membatasi kegiatan masyarakat baik dalam skala mikro maupun makro telah memberikan dampak terhadap volume perdagangan dunia. Terbatasnya pertumbuhan perekonomian dan industri dunia khususnya Kota Palembang memberikan dampak langsung terhadap kinerja eksport-impor dan juga berdampak tidak langsung kepada kinerja konsumsi dan investasi di suatu negara. Sesungguhnya kebijakan *social distancing* tentu telah menjadikan aktivitas perekonomian menjadi terbatas dan membuat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat Palembang lambat dan turun sekitar 3 persen. (Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Mei 2021).

Dengan proyeksi tersebut, pada gilirannya telah membuat iklim perekonomian masyarakat Palembang berkisar 3,4 sampai dengan 3,8 persen menurun pada tahun 2020. Puncak perlambatan ekonomi Masyarakat Palembang dipengaruhi sejumlah faktor, dimulai dari penurunan konsumsi rumah tangga, investasi, perdagangan hingga eksport impor terutama yang berkaitan dengan sektor kelapa sawit, karet dan batu bara yang berada di wilayah Sumatera Selatan. Selain itu, imbas dari covid 19 juga terasa bagi mereka pelaku usaha kecil menengah (UMKM) yang masih terjebak dengan pola-pola pemasaran yang konvensional sehingga menuntut mereka untuk lebih kreatif dan adaptif terhadap situasi yang berkembang sehingga mereka mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari

untuk keluarganya. Dengan kontribusi lebih dari 65 persen terhadap PDRB Palembang, jika terjadi perlambatan di sektor tersebut maka akan berpengaruh secara signifikan pada penurunan ekonomi masyarakat Palembang.

Sumatera Selatan yang dikenal dengan provinsi yang subur akan lumbung pangannya, tidak terlepas dari tersedianya potensi sumberdaya alam yang cukup banyak, mulai dari irigasi sawah, rawa pasang surut, lebak serta lahan kering. Keunikan sumber daya alam yang demikian apabila tidak dikelola dengan benar maka akan menimbulkan persoalan yang serius bagi masyarakat Palembang pada umumnya dan petani khususnya Sumatera Selatan. Kondisi lahan dan sumber daya alam lahan di Palembang sendiri terbagi atas lahan potensial dan lahan fungsional (Kurniawan & Wahyudati, 2015).

Kota Palembang merupakan ibukota dari Sumatera Selatan yang menjadi pusat perekonomian dan pusat interaksi sosial sebagai ikon dari Provinsi Sumatera Selatan yang terkena dampak pandemi Covid-19 yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya perubahan perekonomian masyarakat baik Palembang sendiri maupun mempengaruhi perekonomian masyarakat kota yang berada disekitarnya. Palembang sendiri memiliki lahan pertanahan dan agrarian yang sangat potensial yang tersebar di beberapa Kecamatan seperti: Kecamatan Gandus, Kecamatan Kalidoni, Kecamatan Plaju dan Kecamatan Kertapati.

Pemulihan ekonomi pasca pandemic covid 19 di Kota Palembang diharuskan mewujudkan beberapa variabel pendukung dan strategi ekonomi sesuai dengan kebutuhan pasar dan industri. Perencanaan ini harus terdiri dari strategi dan program yang pada gilirannya menjadi stimulus pelaku usaha ekonomi kreatif dan kerakyatan (Sugiri, 2020). Sesuai perkembangan zaman, maka usaha rakyat harus dikelola menggunakan

teknologi informasi, digitalisasi dan menggunakan media yang dapat menunjang pelaku usaha ekonomi kreatif dan kerakyatan.

Berdasarkan uraian, data dan penjelasan diatas, dari 18 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Selatan, Palembang menjadi kota perekonomian terbesar di Sumatera selatan. Namun, karena pandemic covid 29, Palembang mengalami instabilitas ekonomi pada tahun 2020 yang pada gilirannya membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan ruang lingkup diatas.

## TINJAUAN TEORITIS

Sebagai sebuah negara yang terus tumbuh, tentunya tidak harus berlarut dalam krisis ekonomi pasca pandemi global. Untuk itu perlu dikonsepsikan secara baik melalui perencanaan dan pembangunan ekonomi secara terukur dan sistematis. Teori-pembangunan sendiri menurut beberapa ahli dapat dikategorisasikan ke dalam dua kategori, yang pertama adalah Modernisasi dan yang kedua adalah Ketergantungan. (Raden & Lewellen, 1995) Di dalam konsep kehidupan yang sangat modern teori makro mengenai pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial, serta mikro yang berkaitan dengan nilai-nilai individu akan senantiasa menunjang arus perubahan perekonomian masyarakat. Sedangkan paradigma Ketergantungan mancakup teori teori Keterbelakangan (*Underdevelopment*), Ketergantungan (*Dependent Development*), dan Sistem Dunia (*World System Theory*). (Diggewisso, 2019).

Pembangunan memiliki makna yang sangat berkaitan dengan kebutuhan manusia dan pasar, maka tidak *an sich* diteliti hanya pada ruang lingkung yang sederhana pada konsep yang statis. Pembangunan dalam hal ini memuat tujuan pada sebuah aktifitas yang tanpa ujung. Maka oleh karenanya, sebuah proses pembangunan merupakan sesuatu

yang statis karena lahir dari suatu perubahan sosial dan budaya.

Pembangunan mengindikasi nilai-nilai terus berproses ke depan dan senantiasa berorientasi pada masa depan dengan berlandaskan kekuatan ekonomi dan aktifitasnya sendiri yang tergantung pada sumber daya manusia yang unggul dengan struktur masyarakat yang progresif. Sehingga dapat difahami bahwa pembangunan tidak pada tataran konsep *top-down*, melainkan tergantung kepada “*innerwill*”, dan proses pembebasan diri sendiri. Dengan demikian, partisipasi yang aktif, kreatif dan inovatif dalam sebuah proses pembangunan hanya memungkin bila terjadi karena proses pendewasaan dan kesadaran dalam diri sendiri. Kehadiran globalisasi dan regionalisasi tentunya telah membawa sekaligus ancaman dan peluang baru bagi proses pembangunan ekonomi dan struktur masyarakat di Indonesia. Dalam kondisi seperti demikian, kondisi persaingan antar pelaku ekonomi termasuk ekonomi kreatif (koperasi, UMKM dan BUMN) akan semakin menguat. Dalam dunia persaingan yang semakin kompetitif, tiap pelaku ekonomi baik swasta maupun negeri seperti BUMN dituntut dapat menerapkan serta mengimplementasikan secara efisien dan efektif strategi persaingan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Teori modernisasi dan ketergantungan yang terdapat dalam teori pembangunan (Lewwellen 1995, Larrin 1994, Kiely 1995 dalam Tikson, 2005). melengkapi teori makro bagaimana pertumbuhan ekonomi dan perubahan masyarakat serta teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Teori ketergantungan meliputi teori-teori keterbelakangan (*underdevelopment*) ketergantungan (*dependent development*) dan sistem dunia (*world system theory*) sesuai dengan klasifikasi Larrain (1994). Sedangkan Tikson (2005)

membaginya ke dalam tiga klasifikasi teori pembangunan, yaitu modernisasi, keterbelakangan dan ketergantungan, sehingga keterbelakangan menjadi titik dan point khusus dari teori yang dijabarkan oleh Tikson.

Pembangunan sejatinya merupakan sebuah proses dinamisasi yang digerakkan melalui cita cita secara sadar dan terukur. Sehingga dalam perkembangannya sebuah proses perubahan yang terjadi secara natural memiliki dampak pada lahirnya sebuah pembangunan. Hakikat dari pembangunan bagaikan mata uang yang sulit dipisahkan dari pertumbuhan itu sendiri, dalam makna yang lebih luas bahwa pembangunan dapat mengakibatkan hadirnya pertumbuhan dan pertumbuhan akan lahir sebagai musabab adanya pembangunan. Pertumbuhan dalam pengertian ini bisa dalam bentuk pengembangan atau perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari kegiatan yang diaktualisasikan oleh suatu komunitas masyarakat. (Digdowiseiso, 2019)

## METODE PENELITIAN

Secara alamiah, berdasarkan objek penelitian peneliti dalam menganalisis persoalan dinamika perekonomian khususnya pada masa covid 19 menggunakan metode dan pendekatan kualitatif fenomenologi yang dimaksudkan untuk mengungkap esensi global dari fenomena yang dialami secara mengejutkan oleh sekelompok individu dalam hal ini adalah pelaku UMKM, BUMN dan lainnya. (Creswell, 1998).

Secara etimologi Istilah fenomenologi merupakan bahasa Yunani. yaitu “fenomenan” atau “fenomenon” yang berarti “gejala” atau “apa yang telah menampakkan diri” sehingga nyata bagi kita (Drijarkara, 1962:122; Suprayogo dan Tobroni, 2001:102). Terminologi fenomenologi diintrodusir oleh Johann Heinrich Lambert, tahun 1764. Edmund Husserl (1859-1938) yang lebih popular

disebut sebagai bapak fenomenologi, karena intensitas kajiannya dalam studi filsafat. Maka fenomenologi yang kita fahami malalui Husserl adalah ilmu tentang fenomena. (Hamid, 2018).

Fenomenologi sebagai sebuah metode dirumuskan sebagai alat untuk mengukur, memeriksa dan menganalisis kehidupan batiniah individu yang berupa pengalaman mengenai fenomena atau penampakan sebagaimana adanya, yang lazim disebut kedewasaan ataupun kesadaran. Oleh karena itu, Menurut Schutz, Fenomenologi memiliki fungsi untuk mengkonektifitaskan antara pengetahuan ilmiah dengan pengalaman empiris dilapangan, sedangkan aktifitas dan rutinitas sehari-hari merupakan sumber dan akar dari pengetahuan ilmiah itu sendiri.

Adapun penelitian kualitatif dalam perkembangannya dipandang sebagai sebuah proses dari kegiatan ilmiah melalui *deep analysis*. Penelitian kualitatif mengedepankan pada analisa mendalam sebuah substansi makna dari gejala dan fenomena itu sendiri. Oleh karenanya, metode kualitatif sangat bergantung pada penggunaan kata dan kalimat yang ada pada penelitian tersebut. Fokus dari kualitatif adalah pada proses serta pendalaman makna itu sendiri dan terfokus pada objek, Lembaga, SDM serta interaksi yang terjadi didalamnya dalam memahami suatu fenomena.

Pendekatan kualitatif sejatinya diakui oleh para ahli sebagai jalan alternatif metodologi yang kompatibel untuk dioperasionalisasikan dalam meraih pengetahuan. Bahkan hadirnya kedua jenis metodologi penelitian tersebut dapat dimanfaatkan dan dioperasionalisasikan karena dapat saling membantu dalam mengokohkan hasil dari suatu penelitian. Dalam dinamikanya, banyak terminologi yang dimanfaatkan untuk menyebut bentuk-bentuk penelitian dengan pendekatan kualitatif ini, antara lain: penelitian pascapositivistik, naturalistik,

etnografik, fenomenologis, subjektif, studi kasus, humanistik, dan lain sebagainya.

Menurut Lincoln & Guba. (Lincoln & Guba, 1994) beberapa terminologi tersebut muncul sebagai dasar pandangan yang variatif mengenai perspektif dan sifat yang paling signifikan, yang pada gilirannya menjadikan dasar untuk memilih istilah special sebagai cara untuk membedakan dasar tertentu dari dasar yang lainnya.

Adapun referensi yang disajikan penulis untuk menyokong penelitian ini berasal dari data kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan sumbernya seperti dari dokumen pemerintahan dan Lembaga pemerintahan, berita media online yang kredibel, jurnal ilmiah, website resmi pemerintah dan kementerian/Lembaga negara yang mempublikasikan datanya yang pada gilirannya dapat mendukung penelitian ini dan dapat diuji secara triangulasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut data yang disampaikan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharan Propinsi Sumatera Selatan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementeri Keuangan bahwa angka pertumbuhan masyarakat yang bekerja di Propinsi Sumatera Selatan pada Agustus 2020 sebanyak 4,33 juta orang naik sekitar 126, 9 ribu orang dibanding Agustus 2019 dari total masyarakat Sumatera Selatan 8,467 juta jiwa. Hal tersebut mengindikasikan bahwa lebih dari 50 persen penduduk propinsi Sumatera Selatan berada pada usia produktif. Nilai tukar petani (NTP) Propinsi Sumatera Selatan terendah dalam kurun waktu Januari 2016 sampai dengan akhir tahun 2020 adalah terjadi pada bulan Mei 2020 sebesar 88,56 persen sedangkan NTP tertinggi terjadi pada medio akhir 2020 sebesar 101,83 persen.

Selain itu, pada tahun 2020 total pendapatan perekonomian untuk seluruh pemerintah daerah di wilayah Sumatera Selatan memiliki proporsi 75,76 persen

dari total *in come* sehingga pemerintah daerah di wilayah Sumatera Selatan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera telah mengalokasikan anggaran yang bertujuan untuk mempercepat persoalan Covid 19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp. 203.989.881.777,- atau sebesar 1,91 persen dari total Belanja Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 198.568.741.738 atau 97,34 persen. Dari data yang ditunjukan diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dalam penanganan Covid 19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sangat fokus meskipun masih bergantung kepada transfer dari pemerintah pusat. (Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sumatera Selatan, 2020).IMF dan World Bank telah memprediksi bahwa pandemic covid 19 niscaya akan memicu resesi ekonomi global. Bahkan para pakar ekonomi memperkirakan pandemi tersebut akan berdampak pada sebuah kondisi yang disebut *great depression* bahkan lebih buruk daripada periode sebelumnya 1920-1930. (Dedi Junaedi, 2020) Selain itu, otoritas keuangan dalam negeri seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menganalisis bahwa akibat pandemic tersebut dapat berdampak pada keadaan ekonomi yang memburuk paling tidak sampai dengan akhir tahun 2021.

Dilihat dari segi ekonomi pada tahun 2021 seperti yang telah dijelaskan dalam data Kementerian Keuangan RI, *recovery* ekonomi dunia pada kuartal 2021 secara general mengalami perlambatan akibat melonjaknya kasus harian covid 19 di beberapa negara. Pertumbuhan ekonomi dunia pada kuartal III 2021 mencapai 3,5 persen tumbuh melambat jika dibandingkan dengan kuartal II 2021 yang tumbuh mencapai 7,07 persen. Hal tersebut dikarenakan menurunnya mobilitas dan Gerakan ekonomi kerakyatan yang terpapar hampir merata

diseluruh pelosok daerah. Oleh karena itu, dalam rangka untuk mendorong perbaikan ekonomi, Bank Indonesia terus meningkatkan koordinasi baik dengan pemerintahan dan kementerian/Lembaga terkait.

Pelaku usaha UMKM yang pada rutinitas harianya memang mengalami permasalahan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarganya, pada kondisi covid 19 menjadi semakin tertekan. Masyarakat semakin hari semakin sulit mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Dampaknya, jangankan untuk membeli barang-barang yang mahal, bahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari mereka sulit untuk mewujudkannya. Oleh karenanya, dibutuhkan Langkah solutif dari pemerintah kota Palembang yang sebagian besar masyarakatnya adalah pelaku usaha kecil dan menengah mencoba melakukan berbagai pekerjaan yang dapat menghidupi keluarganya, seperti berusaha memasuki dunia jasa transformasi usaha ke online, menjadi *delivery order*, berdagang sembako, dan lain sebagainya yang dapat memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Sehingga dapat difahami bahwa berdasarkan tingkat pendapatan, perubahan pekerjaan masyarakat yang konvensional ke ekonomi yang lebih kreatif lebih menjanjikan apalagi apabila masyarakat tersebut dapat mengkombinasikan antara konvensional dengan ekonomi kreatif.

Secara praktis penelitian dari data yang dikeluarkan oleh Lembaga otoritatif menunjukan data yang substansif mengenai pergerakan pelaku usaha ekonomi kreatif sangat minim dampaknya apabila dibandingkan dengan pelaku usaha yang konvensional dan tidak mengedepankan kecanggihan dalam dunia teknologi dan informasi yang tentunya sangat digandrungi oleh seluruh lapisan masyarakat yang tidak hanya di Indonesia bahkan diseluruh dunia. Dengan demikian, penelitian kualitatif ini

merekomendasikan sebuah transformasi pelaku usaha ekonomi kreatif yang terus dan secara konsisten perlu ditingkatkan. Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Palembang perlu menyediakan sebuah jasa yang dapat meningkatkan keterampilan dalam ekonomi kreatif, karena peneliti menemukan kurangnya masyarakat memahami apa sejatinya yang dimaksud dengan ekonomi kreatif.

Oleh karenanya, proses *recovery* perekonomian masyarakat agar stabilitas ekonomi masyarakat tetap tumbuh dan terjaga perlu dikonsepsikan dan dipetakan secara jelas oleh para pemangku kebijakan di Indonesia khususnya di kota Palembang yang berorientasi pada kebutuhan industry dan pasar. Peneliti dalam ini merekomendasikan beberapa teori sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat Palembang sekarang seperti *Economic base theory* yang merupakan salah satu teori yang mengusulkan pembangunan daerah berdasarkan kepada pada sektor usaha ekonomi kreatif yang paling banyak diinginkan oleh masyarakat dari berbagai macam daerah. Industry pasar harus mengedepankan sumberdaya manusia yang ada dan berkaitan dengan kearifan lokal.

Selanjutnya adalah teori lokasi. Teori ini mengkalkulasikan bagaimana suatu daerah yang paling ekonomis untuk menyerap dan bermetamorfosis menjadi industry lokal. Ketiga adalah Teori *central place theory*, yang menjadi tempat sentral ekonomi yang disokong oleh beberapa lokasi di sekitarnya sehingga satu lokasi dengan lokasi lainnya saling memperkuat satu sama lain. Interaksi antar masyarakat berbagai macam daerah khususnya daerah yang sangat berdekatan akan menjadi episentrum ekonomi masyarakat daerah.

Alternatif selanjutnya adalah eori model daya tarik. Dalam teori ini dideskripsikan UMKM dan pegiat ekonomi secara umum akan terus berusaha berkembang dan memperbaiki ekonomi jika terdapat bantuan dan insentif

dari pemerintah. Oleh karenanya, subsidi dan insentif menjadi stimulus ekonomi kerakyatan. Sebagai sebuah konsep baru bagi pembangunan daerah, dipercaya bahwa pembangunan daerah harus mengedepankan pasar dan hal tersebut merupakan kebutuhan mutlak di lapangan. Peran pemerintah sangat urgensi dan determinan dalam pergerakan dan pertumbuhan perekonomian daerah, terutama untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah. *Teori spread effects* oleh Myrdal dan teori *trickling down effects* oleh Hirshman (Arsyad, 2010) belum tentu berjalan secara efektif sehingga dibutuhkan peran strategis dari pemerintah daerah yang berorientasi kepada ekonomi kerakyatan. Pemerintah daerah harus secara optimal memberdayakan potensi dan sumber daya yang terdapat di daerah, sebagai strategi ekonomi kerakyatan yang dinginkan oleh masyarakat sekitar.

Oleh karenanya, Usaha Kecil Menengah masyarakat serta hadirnya ekonomi kreatif akan menjadi tempat bersinerginya sebagian bahkan lebih dari setengah pegiat ekonomi. Dalam *recovery* pasca krisis covid 19 yang melanda tidak hanya Indonesia bahkan seluruh dunia, pelaku usaha ekonomi kreatif sejatinya harus cepat bergerak dengan potensi dan keadaan yang sesuai dengan kebutuhan industry pasar. Sehingga ekonomi kreatif menjadi lokomotor penggerak perekonomian bangsa Indonesia.

Belajar dari pasca krisis ekonomi di Indonesia pada masa awal reformasi. Peranan pegiat ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif sangat menentukan karena memiliki potensi penyerapan dunia kerja yang sangat signifikan dan pada gilirannya menyokong perekonomian Indonesia secara terstruktur karena diinisiasi dari bawah. Secara garis besar, ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif juga sebagai bagian dari kearifan lokal yang sangat penting dan kerap menjadi inisiator dalam pertumbuhan ekonomi di

lapisan masyarakat. Namun pada kenyataan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif tidaklah mudah semudah membalikan telapak tangan. Terdapat pelbagai halangan dan kendala yang melanda pada pelaku usaha tersebut. Kekurangan yang paling dominan adalah kurangnya modal yang menyertai serta kurangnya *soft skill* yang dimiliki pelaku usaha tersebut dalam memasarkan produknya. Permintaan pasar menjadi penting dan tidak dapat ditawar lagi oleh pelaku usaha ekonomi kreatif dan kerakyatan karena berdasarkan permintaan pasar, pelaku usaha ekonomi kreatif dan kerakyatan akan mengembangkan dan memperluas profesionalitas bisnisnya.

Persoalan dan problem serius yang menjakiti pelaku pegiat ekonomi kerakyatan dan kreatif setelah covid 19 antara lain mengenai mahalnya produk dasar yang terdapat di pasar. Sehingga mau tidak harganya akan semakin hari semakin mahal dan terus meningkat dan pada gilirannya akan menjadikan daya saing semakin menurun. Persoalan selanjutnya yaitu terjadinya penurunan produksi yang mengakibatkan pegiat usaha semakin menurun dratis. Oleh karena itu dibutuh strategi untuk mengatasi persoala tersebut dengan melakukan inovasi sebuah produk. Para pelaku usaha ekonomi kreatif dan kerakyatan harus menghadirkan siasat dan strategi baru dalam memasarkan produknya.

Penyusunan sebuah strategi yang berorientasi pada penyesuaian kebutuhan pasar dan industri sebagai imbas terjadinya covid 19 yang meluluh lantakan sendi perkonomian dunia. Pembangunan yang bersifat inklusif baik di daerah terpencil maupun yang sudah maju di beberapa daerah di Palembang merupakan salah satu solusinya. Perekonomian masyarakat Palembang harus secara *balance* dan terstruktur dengan upaya pemberdayaan masyarakat secara terukur. Integrasi dunia industry dan bisnis

diharapkan menjadi episentrum pembangunan secara komprehensif dan terintegrasi. Dukungan tersebut pada gilirannya akan meningkatkan pelaku usaha ekonomi kreatif dan kerakyatan di Kota Palembang. Dengan demikian, Pemerintah Kota Palembang harus berinisiatif untuk memajukan dan mengedepankan infrastruktur, iklim investasi, dan menjaga stabilitas perekonomian masyarakat. Pengentasan kemiskinan haruslah menjadi prioritas utama program pembangunan pemerintah Kota Palembang ke depan.

Dampak dari wabah pandemi covid 19 terhadap petani kecil dan penggarap lahan pertanian di Kota Palembang mengalami kerugian karena menurunnya harga produk dari hasil pertanian mereka, yang pada umumnya merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Meskipun tidak dapat dipungkiri pada beberapa sektor denga adanya krisis dan pandemic justru terjadi peningkatan harga produk. Kondisi demikian seharusnya dapat melahirkan produk pertanian yang kompetitif dan berorientasi pada kreatifitas petani yang bersangkutan. Untuk itu, sangat dibutuhkan fasilitas dari pemerintah baik penyertaan modal, subsidi, insentif hingga peningkatan soft skill masyarakat kota Palembang.

Perkembangan sektor pertanian dalam arti luas, yang tidak mengalami penurunan, dan menunjukkan bahwa sektor pertanian dapat dijadikan penyokong utama dalam masa *recovery* ekonomi. Selain itu, pengusaha kecil lainnya seperti jasa kuliner dan industry rumah yang memproduksi *cemilan* ringan seperti kerupuk basah dan kue harus mampu Bersama sama membangkitkan ekonomi kreatif dan kerakyatan

Untuk mempertahankan momentum ekonomi dan mencegah dampak pandemi meninggalkan bekas luka ekonomi dan social yang berkesinambungan, pemerintah kota Palembang harus focus terhadap respon kebijakan yang tentunya

untuk memperkuat investasi, mempercepat akumulasi modal manusia dan meningkatkan produktifitas pelaku usaha UMKM. Problematika yang terjadi pasca covid 19 perlu segera diatasi salah satunya dengan mempercepat proses vaksinasi dan pemerataan pengobatan masyarakat Palembang yang terjangkit virus covid 19. Selain itu, Pemerintah Kota Palembang juga harus mempertahankan kebijakan keuangan daerah yang akomodatif sambil mempersiapkan kalibrasi kebijakan seiring dengan berkembangnya tekananan ekonomi baik pada tataran global maupun domestik.

Di tengah hentakan ekonomi, stabilitas harga barang dan jasa di Provinsi Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang diproyeksikan tetap aman. Pada data pertenggan 2021 yang dirilis oleh BPS Sumsel, permintaan dari kebutuhan masyarakat untuk makanan dan minuman dari sektor penyedia makanan dan minuman diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan tingginya permintaan dari masyarakat. Sementara itu, tekanan inflasi Sumatera Selatan di tahun 2021 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, namun tetap berada di dalam kisaran target inflasi nasional. Meningkatnya tekanan inflasi tersebut diperkirakan terjadi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau serta pada para pengusaha layanan jasa transportasi.

Karena itu, untuk kebangkitan ekonomi pasca covid 19, Pemerintah Kota Palembang harus memperkuat institusi publik dan pelayanan serta menyelaraskan strategi yang memberikan sinyal yang jelas terhadap arah transisi yang lebih baik dan sistematis. Mereformasi energi terbarukan dan meningkatkan produksi local dan UMKM secara bertahap akan meningkatkan ketahanan ekonomi sector swasta. Meningkatkan kecukupan pendapatan pada masa awal pemulihan ekonomi pasca covid 19 menjadi penting

untuk membiayai kebutuhan investasi jangka Panjang. Terakhir, rencana yang komprehensif perlu dikembangkan demi memastikan bahwa masyarakat dan komunitas UMKM serta pelaku usaha ekonomi kreatif dan kerakyatan akan mendapat profit dan benefit dari transisi menuju ekonomi Palembang yang lebih kuat

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan deskripsi data yang disajikan dapat disimpulkan bahwa upaya pemulihan ekonomi pasca pandemic covid 19 di Kota Palembang diharuskan mewujudkan beberapa variabel pendukung dan strategi ekonomi sesuai dengan kebutuhan pasar dan industri. Perencanaan ini harus terdiri dari strategi dan program yang pada gilirannya menjadi stimulus pelaku usaha ekonomi kreatif dan kerakyatan (Sugiri, 2020). Sesuai perkembangan zaman, maka usaha rakyat harus dikelola menggunakan teknologi informasi, digitalisasi dan menggunakan media yang dapat menunjang pelaku usaha ekonomi kreatif dan kerakyatan.

Peranan pemerintah Kota Palembang sangat urgensi dalam menyediakan dan fasilitasi program pemulihan perekonomian Kota Palembang serta dapat mendoornya semua pihak yang terlibat dalam upaya pemulihan ekonomi untuk lebih kreatif dalam memasarkan produknya. Pemerintah Kota Palembang harus sigap dalam menyediakan dan memfasilitasi adanya penyertaan modal bagi pelaku usaha ekonomi kreatif dan kerakyatan, baik berupa insentif dan subsidi dari pemerintah maupun dari sektor keuangan lainnya. Pemerintah dalam hal ini pemerintah kota Palembang harus menyokong pelaku usaha ekonomi kreatif dan kerakyatan yang ada di Kota Palembang untuk secara signifikan dalam mendorong dan membantu usaha rakyat dan ekonomi kreatif yang berjuang memulihkan perekonomian pasca covid

19. Selain itu juga, Pemerintah Kota Palembang harus dapat memfasilitasi pelatihan *soft skill* guna pengembangan pemasaran ke kota/ kabupaten lain bahkan hingga ke luar negeri. Selain itu, perlu strategi khusus yang dapat mendatangkan investor sehingga pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang semakin kompetitif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Armansyah, A., Taufik, M., & Wulantari, R. A. (2021). Dampak Sosial Ekonomi Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha Informal Offline dan Online di Kota Palembang. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*, 5(1), 73-82.
- Budiman, Arief. 2000, Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, 1998. Qualitative Inquiry: Choosing Among Five Traditions. USA: Sage Publications Inc
- Digdowiseiso, K. (2019). Teori pembangunan.Jakarta: LPU Unas
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. *Handbook of qualitative research*, 2(163-194), 105.
- Hadi, S. (2005). Strategi Pembangunan, Mahatir & Soeharto. Jakarta: Pelangi Cendekia and Japan Foundation.
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), 83-92.
- Hamid, F. (2018). Pendekatan Fenomenologi (Suatu Ranah Penelitian Kualitatif). *Pendekatan Fenomenologi*.
- Hertinawati, H. (2021). Analisa terhadap Kebijakan Fiskal dan Moneter Indonesia dalam Menghadapi Wabah Pandemi Covid-19. *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi,*

*Stabilitas UMKM Pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Palembang Pasca Pandemi Covid 19 -  
Kiki Mikail, Maya Panorama, Otoman*

- Keuangan dan Investasi), 4(2), 118-130.*
- Jhingan, M. L. (2012). Ekonomi Pembangunan Perencanaan. *Jakarta: Rajawali Pers.*
- Junaedi, Dedi, Salistia Faisal, 2020. Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak, Simposium Nasional Keuangan Negara
- Roden, D. M., & Lewellen, W. G. (1995). Corporate capital structure decisions: evidence from leveraged buyouts. *Financial Management*, 76-87.
- SUSILAWATI, S., & Yamin, M. (2022). *PERSEPSI PERUBAHAN PERILAKU SOSIAL EKONOMI PETANI PADI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN PLAJU DARAT KECAMATAN PLAJU KOTA PALEMBANG* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University). Brawijaya Malang. 20-21 Pebruari 2006